

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Studi ini menunjukkan bahwa fenomena politik *pork barrel* dapat bekerja di ranah pemerintahan desa yang dilakukan oleh aktor eksekutif yaitu kepala desa. Pemerintah desa memiliki ruang yang diakui oleh pemerintah nasional untuk mengelola pemerintahan secara mandiri melalui otonomi desa. Implikasinya membuka peluang untuk aktor eksekutif membawa politik kepentingan pada proses anggaran agar kepentingannya mampu terakomodasi sampai pada tahap konsensus. Praktiknya politik *pork barrel* yang dilakukan petahana M dengan cara memanfaatkan akses yang menghubungkannya dengan sumber daya dan mempengaruhi hasil kebijakan agar memenuhi distribusi di wilayah konstituennya.

Fokus penelitian ini untuk membuktikan bahwa bansos sebagai sumber daya dimanfaatkan menjadi alat politis petahana memobilisasi dukungan. Hasil temuan secara keseluruhan mampu menjawab pertanyaan penelitian bahwa petahana terindikasi memanfaatkan program bansos. Metodenya adalah dengan memperbesar perolehan jatah bansos dan mendistribusikannya secara kolektif dengan harapan dipertukarkan oleh dukungan suara. Secara khusus bansos yang dimanfaatkan adalah jenis bansos regular dan sebagian kecil bansos non-regular seperti BLT, dan RTLH.

Temuan lain yang mendukung faktor kemenangan petahana adalah kepemilikan modalitas politik yang kuat dan lebih mendominasi dibandingkan

dengan lawan politiknya. Modal politik dan sosial petahana diuntungkan dari posisinya yang strategis berinteraksi langsung dengan para individu yang memiliki kuasa, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa. Modal ekonomi berupa kekayaan pribadi milik petahana beserta kerabat terdekatnya menempatkan keluarganya sebagai warga yang berstatus sosial sebagai *juragan*. Isitilah *juragan* dimaknai sebagai orang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan sehingga cenderung lebih disegani oleh masyarakat desa.

## **6.2 Saran**

Wawancara penulis dengan berbagai informan baik meliputi pemerintah kabupaten, perangkat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa Ampelsari menyatakan adanya hambatan dan ketimpangan sosial. Berangkat dari keresahan publik yang diwakili oleh para informan serta dengan dasar pertimbangan nilai etis, berikut saran yang dapat diberikan peneliti :

1. Masih diperlukan pengawasan dalam proses distribusi dan pemeriksaan secara berkala untuk memvalidasi keabsahan syarat penerima manfaat program bansos regular khususnya non-PKH yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau diwakili pemerintah kabupaten/kota.
2. Diperlukan peninjauan secara langsung dan menyeluruh dari pihak pemerintah desa kepada warga yang diajukan sebagai calon penerima manfaat.

3. Partisipasi politik masyarakat untuk ikut serta mengawasi dan mengkritisi kinerja pemerintahan desa perlu ditingkatkan dengan menguatkan basis kelompok kepemudaan dan atau tokoh masyarakat.
4. Mengenai fenomena politik uang membutuhkan komitmen dan konsistensi seluruh pihak dalam hal ini pemerintahan, organisasi masyarakat, instansi pendidikan, dan masyarakat di Ampelsari untuk meningkatkan kecerdasan berpolitik.

### **6.3 Keterbatasan Penelitian**

Peneliti mengakui bila studi ini memiliki keterbatasan, harapannya studi lain yang nantinya turut melengkapi referensi akademis berkaitan dengan pembahasan *pork barrel* dan pemilihan kepala desa mampu memperbaiki kekurangan dari penelitian terdahulu.

1. Keterbatasan narasumber

Peneliti tidak berhasil memperoleh akses untuk mewawancarai kepala desa. Kemudian, beberapa pihak tokoh desa dan perangkat desa yang dituju peneliti menolak akses untuk memberikan informasi dengan alasan sensitivitas topik. Sehingga, keterbatasan akses tersebut mengurangi hasil analisis data secara objektif.